

Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Kota Bengkulu: Pendekatan Derajat Desentralisasi Fiskal



Esti Pasaribu¹, Septriani², Benardin³, dan Ratu Eva Febriani⁴

^{1,2,3,4}Jurusan Ekonomi Pembangunan, Universitas Bengkulu, Provinsi Bengkulu, Indonesia

¹estipasaribu@unib.ac.id, ²septriani@unib.ac.id, ³benardin@unib.ac.id, ⁴ratuevafebriani@unib.ac.id

INFO ARTIKEL

Tanggal revisi:
18 November 2020

Tanggal diterima:
26 Januari 2021

Tanggal diterbitkan online:
28 Januari 2021

Kata Kunci:

Financial performance, fiscal decentralization, government local tax, local retribution, GRDP.

ABSTRAK

The purpose of this study empirically to analyze the financial performance of the Bengkulu government with a degree of fiscal decentralization approach. The data used in this study is secondary data. Data was processed using multiple linear regression analysis tools (multiple regression). The empirical results of this study indicate that the financial performance of Bengkulu Government was very low and also founded a very large difference between government spending and regional opinion. Further, local tax has influential positive and significant to financial performance of Bengkulu City, then local retribution and Gross Regional Domestic Product (GRDP) has influential negative and significant to financial performance of Bengkulu City and local asset management has influential negative and not significant. Bengkulu Government still relies on assistance from the Central Government and not independent. This can be an underline for local government to improve their independently and capability.

1. PENDAHULUAN

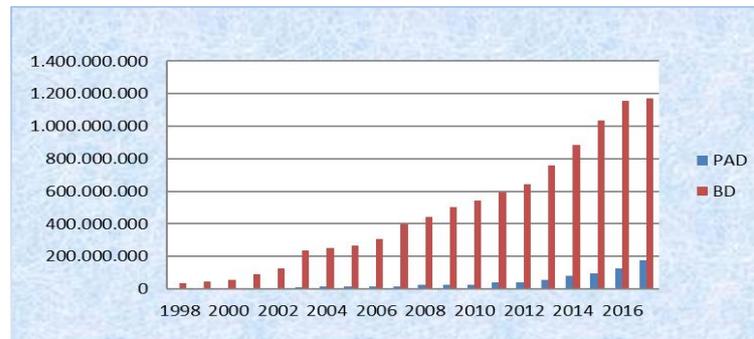
Dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan, salah satu hal yang dilakukan oleh penyelenggara Pemerintahan Daerah adalah pengelolaan keuangan Daerah (UU No.23 Tahun 2014). Dalam hal ini, salah satu kewajiban pemerintah daerah yaitu mengatur, mengelola, dan memaksimalkan kinerja keuangan daerah. Menurut Halim (2004), kinerja keuangan daerah merupakan salah satu ukuran yang dapat digunakan untuk melihat

kemampuan daerah dalam menjalankan otonomi daerah tersebut. Semakin baik kinerja keuangan suatu daerah, maka menunjukkan semakin tinggi tingkat kemandirian suatu daerah dalam memenuhi semua kebutuhannya.

Adapun salah satu alat ukur yang biasa digunakan untuk melihat kinerja keuangan adalah rasio desentralisasi fiskal. Pada derajat desentralisasi fiskal terdapat dua variabel yang dibandingkan yaitu pendapatan asli daerah dan total penerimaan daerah. Besar kecilnya pendapatan asli daerah (PAD) akan menentukan seberapa besar kontribusi PAD terhadap penerimaan total daerah. Selain itu, berdasarkan PAD yang diperoleh, dapat juga diketahui tingkat efektivitas kinerja keuangan pemerintah. Hal ini menunjukkan bahwa PAD memiliki peranan penting dalam menentukan tingkat kinerja keuangan daerah dalam membiayai kegiatan pemerintah dan pembangunan daerah. Jika PAD meningkat, maka kinerja keuangan juga akan meningkat dan sebaliknya jika PAD yang dimiliki kecil, maka kinerja keuangan daerah juga akan terhambat (Adi, 2012).

Sejak diterapkan kebijakan desentralisasi, kondisi keuangan Kota Bengkulu terlihat memiliki kecenderungan membaik. Hal ini ditunjukkan dengan meningkatnya Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Bengkulu sejak tahun 2000 hingga 2017. Namun, jika kita bandingkan dengan besarnya belanja yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Bengkulu, maka terdapat perbedaan yang cukup signifikan antara PAD terhadap belanja daerah. Berdasarkan Gambar 1 dapat dilihat bahwa sebagian besar belanja daerah bukan bersumber dari pendapatan asli daerah. Terlihat bahwa sebagian besar pengeluaran pembangunan pemerintah kota Bengkulu berasal dari bantuan pusat dan pendapatan lain-lain yang sah. Hal ini mengindikasikan adanya ketidakefisienan dalam pengelolaan keuangan Kota Bengkulu. Selain itu, ketidakefisienan dalam kinerja keuangan di Bengkulu juga ditunjukkan dengan realisasi PAD tahun 2017 yang hanya mencapai Rp. 174.405.000.000, yang jika dibandingkan dengan total pendapatan daerah, rasio PAD hanya sebesar 14,86 persen. Secara umum hal ini mengindikasikan rendahnya kemandirian pemerintah daerah di Kota Bengkulu dalam membiayai belanjanya. Pada prinsipnya semakin besar kontribusi PAD terhadap pendapatan daerah akan menunjukkan semakin kecil ketergantungan daerah kepada pusat (Sulistiyorini, 2005). Walaupun demikian, penelitian yang dilakukan oleh Khamdana (2016) menyebutkan bahwa desentralisasi fiskal tidak terbukti meningkatkan

pertumbuhan ekonomi sebuah wilayah. Adapun perbandingan Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap belanja daerah dapat dilihat pada Gambar 1 berikut.



Sumber: Statistik Keuangan Pemerintah Provinsi Bengkulu (BPS Provinsi Bengkulu, data diolah)

Gambar 1.
PAD dan Belanja Daerah Pemerintah Kota Bengkulu Tahun 2000-2017

Menurut Adi (2012), adanya alokasi transfer DAU yang diberikan pemerintah pusat ke pemerintah daerah dalam perkembangannya tingkat kemandirian daerah justru tidak mengalami perbaikan, bahkan cenderung mengalami penurunan. Begitu pun dengan kemampuan pemerintah Kota Bengkulu dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) tidak mengalami peningkatan yang cukup signifikan. Oleh karena itu, perlu memperhatikan variabel yang membentuk Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang terdiri dari pajak daerah, retribusi daerah, lain-lain pendapatan daerah yang sah dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan. Jika sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) bisa ditingkatkan, maka kemampuan daerah dalam membiayai pembangunan pun akan semakin meningkat. Jika pendapatan asli daerah meningkat maka dana yang dimiliki oleh pemerintah daerah akan lebih banyak dan tingkat kemandirian daerah akan meningkat pula. Menurut Sidik (2002), daerah yang memiliki pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang positif mempunyai kemungkinan memperbaiki kondisi perekonomian menjadi lebih baik. Akan tetapi yang menjadi permasalahannya adalah belum diketahuinya sumber-sumber PAD yang potensial, sehingga belum bisa menentukan skala prioritas dalam pembuatan kebijakan guna meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Oleh karena itu, berdasarkan permasalahan-permasalahan tersebut, peneliti bermaksud melakukan analisis mengenai Kinerja Keuangan Pemerintah Kota Bengkulu apakah sudah baik atau belum juga bagaimana pengaruh pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah

yang dipisahkan dan PDRB Perkapita terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Kota Bengkulu.

2. TINJAUAN PUSTAKA DAN HIPOTESIS

Konsep Kinerja Keuangan Daerah

Whittaker (1995) dalam *Government Performance and Result Act, A Mandate for Strategic Planning and Performance Measurement* menyatakan bahwa pengukuran atau penilaian kinerja keuangan adalah suatu alat manajemen untuk meningkatkan kualitas pengambilan keputusan dan akuntabilitas. Kinerja keuangan pemerintah daerah adalah tingkat pencapaian hasil kerja bidang keuangan daerah yang mencakup penerimaan dan belanja daerah dengan menggunakan indikator keuangan yang ditetapkan melalui suatu kebijakan atau ketentuan perundang-undangan selama satu periode anggaran (Holtz dkk, 1994).

Analisis kinerja keuangan dilakukan pada dasarnya untuk menilai kinerja di masa lalu dengan melakukan beberapa analisa sehingga diperoleh posisi keuangan yang mewakili realitas entitas dan potensi kinerja yang akan terus berkelanjutan. Salah satu alat yang digunakan untuk menilai kinerja pemerintah daerah dalam pengelolaan keuangan daerah adalah analisis rasio keuangan. Dalam organisasi pemerintah untuk mengukur kinerja keuangan ada beberapa ukuran kinerja, yaitu rasio derajat desentralisasi, rasio ketergantungan keuangan daerah, rasio kemandirian daerah, rasio efektivitas dan efisiensi, derajat kontribusi BUMD, *debt service coverage ratio*, rasio utang terhadap pendapatan daerah, rasio tingkat pembiayaan SiLPA.

Rasio derajat desentralisasi dihitung berdasarkan perbandingan antara jumlah PAD dengan total pendapatan daerah. Rasio ini menunjukkan derajat kontribusi PAD terhadap total pendapatan daerah. Semakin tinggi kontribusi PAD, maka semakin tinggi kemampuan pemerintah daerah dalam penyelenggaraan desentralisasi. Kelompok pendapatan daerah menurut Permendagri No. 21 Tahun 2011 yaitu pendapatan asli daerah, dana perimbangan, dan lain-lain pendapatan daerah yang sah. Sedangkan menurut Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010 dana perimbangan diganti dengan istilah pendapatan transfer, sehingga klasifikasi pendapatan daerah menjadi pendapatan asli daerah, pendapatan transfer, dan

lain-lain pendapatan daerah yang sah. Pendapatan Asli Daerah (PAD), terdiri dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. Menurut Mahmudi (2010), rasio ini dirumuskan sebagai berikut:

$$\text{Derajat Desentralisasi} = \frac{\text{PAD}}{\text{Total Pendapatan Daerah}} \times 100\%$$

Penelitian Terdahulu

Penelitian tentang pengaruh PAD terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah telah dilakukan oleh Wenny (2012) yang meneliti pengaruh PAD terhadap kinerja keuangan pada pemerintah kabupaten dan kota di Provinsi Sumatera Selatan. Penelitian ini menghasilkan kesimpulan bahwa PAD secara simultan berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan pada pemerintah kabupaten dan kota di Provinsi Sumatera Selatan, artinya keseluruhan dari komponen PAD sangat mempengaruhi kinerja keuangan pada pemerintah kabupaten dan kota di Provinsi Sumatera Selatan sesuai dengan prinsip-prinsip otonomi daerah, sedangkan secara parsial hanya lain-lain PAD yang sah yang secara dominan berpengaruh terhadap kinerja keuangan pada pemerintah kabupaten dan kota di Provinsi Sumatera Selatan, sedangkan pajak daerah, retribusi daerah, dan hasil perusahaan dan kekayaan daerah tidak dominan mempengaruhi kinerja keuangan pada pemerintah kabupaten dan kota di Provinsi Sumatera Selatan.

Hal ini sesuai penelitian yang dilakukan oleh Indriani dan Sastradipraja (2014) yang menyebutkan bahwa PAD berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan Pemerintah Daerah Cirebon Tahun 2008-2012. Menurut penelitian yang dilakukan oleh Muhayanah (2016), PAD berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah yang artinya dengan adanya peningkatan PAD dapat meningkatkan Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah di Provinsi Jawa Tengah.

Selain itu, penelitian serupa juga dilakukan oleh Mukarramah (2017) yang meneliti tentang pengaruh pajak daerah dan retribusi daerah terhadap kemandirian keuangan daerah di Provinsi Jawa Barat Tahun 2008-2014. Penelitian ini hasilnya adalah bahwa secara

Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Kota Bengkulu: Pendekatan Derajat Desentralisasi Fiskal

simultan pajak daerah dan retribusi daerah berpengaruh signifikan terhadap Kemandirian Keuangan Daerah di lima Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Barat, sedangkan secara parsial pajak daerah berpengaruh signifikan terhadap kemandirian keuangan daerah di lima kabupaten kota Provinsi Jawa Barat dan retribusi daerah tidak berpengaruh signifikan terhadap kemandirian keuangan daerah di lima Kabupaten Kota Provinsi Jawa Barat.

Alfarisi (2015) juga melakukan penelitian tentang pengaruh pajak daerah, retribusi daerah dan dana perimbangan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah di Provinsi Sumatera Barat. Adapun hasil penelitian ini adalah bahwa pajak daerah berpengaruh signifikan dan positif terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Retribusi daerah berpengaruh signifikan positif terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Selain itu, penelitian sejenis juga dilakukan oleh Nggilu dkk (2016) yang meneliti tentang pengaruh pajak daerah dan retribusi daerah terhadap kemandirian keuangan daerah pada pemerintah kabupaten/kota di Provinsi Gorontalo. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa secara parsial variabel pajak daerah berpengaruh secara signifikan positif terhadap kemandirian keuangan daerah dengan nilai signifikansi 0,000 dan untuk variabel retribusi daerah juga berpengaruh secara signifikan positif terhadap kemandirian keuangan daerah dengan nilai signifikansi 0,006. Kemudian secara simultan variabel pajak daerah dan retribusi daerah berpengaruh positif terhadap kemandirian keuangan daerah. Dimana variabel pajak daerah dan retribusi daerah hanya mempunyai kontribusi sebesar 76% terhadap variabel kemandirian keuangan daerah, sedangkan sisanya sebesar 34% disumbangkan oleh variabel lain yang tidak diamati dalam penelitian.

Sementara itu, Saputra dan Fachruzzaman (2016) melakukan penelitian mengenai pengaruh penerimaan daerah dan retribusi daerah terhadap kinerja keuangan PAD kabupaten/kota di wilayah Indonesia. Pada penelitian ini, pajak daerah dan retribusi daerah berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan pemerintah yang baik.

Pranomo (2014) dalam penelitiannya menyebutkan bahwa untuk menilai kinerja pemerintah daerah dalam mengelola keuangan, perlu dilakukan analisis rasio keuangan. Analisis ini dilakukan untuk melihat kinerja keuangan guna mengetahui tingkat efisiensi dan efektivitas pemerintah dalam mengelola sumber daya. Dengan demikian dapat terlihat apakah pemerintah daerah sudah mandiri di masa desentralisasi fiskal seperti saat ini

(Pranomo, 2014). Sementara Rukmana (2013) meneliti tentang pengaruh pajak daerah, retribusi daerah, dan dana perimbangan terhadap kinerja keuangan pemerintah Provinsi Kepulauan Riau. Variabel penelitian tersebut adalah pajak dan retribusi daerah serta dana perimbangan. Hasil penelitiannya menyimpulkan bahwa secara parsial, pajak dan retribusi daerah tidak berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan, berbeda dengan dana perimbangan yang berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan

Hendaris (2014) melakukan penelitian mengenai pengaruh penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah terhadap peningkatan pendapatan asli daerah di Provinsi Jawa Barat. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa secara simultan pajak daerah dan retribusi daerah berpengaruh terhadap peningkatan pendapatan asli daerah di kabupaten dan kotamadya di Jawa Barat. Sementara itu, secara parsial pajak daerah berpengaruh terhadap peningkatan pendapatan asli daerah di Jawa Barat, sedangkan secara parsial retribusi daerah tidak berpengaruh terhadap peningkatan pendapatan asli daerah di Jawa Barat. Kemudian, penelitian Tumangger (2014) juga menemukan bahwa pajak daerah dan dana perimbangan berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah, sedangkan retribusi daerah tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah.

Hipotesis

Terkait dengan kinerja keuangan, penelitian ini memiliki beberapa hipotesis yaitu; pertama Kinerja Keuangan Pemerintah Kota Bengkulu masih belum baik, dan hipotesis kedua adalah bahwa pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan PDRB Per Kapita berpengaruh signifikan terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Kota Bengkulu.

3. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan data sekunder berupa data *time series* yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik. Data-data yang dikumpulkan tersebut adalah data pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan PDRB Per Kapita. Data yang digunakan adalah data tahunan yang berada pada periode pengamatan pada tahun 2000-2018. Untuk menentukan tingkat kinerja keuangan Pemerintah Kota Bengkulu, dapat diketahui dengan rumus rasio desentralisasi fiskal sebagai berikut:

Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Kota Bengkulu: Pendekatan Derajat Desentralisasi Fiskal

$$DDF = \frac{PADt}{TPDt} \times 100\% \dots\dots\dots (1)$$

Dimana:

DDF adalah derajat desentralisasi fiskal

PADt adalah Total PAD tahun t

TPDt adalah Total penerimaan daerah tahun t

Adapun sebagai skala untuk melihat kemampuan keuangan daerah dapat menggunakan Tabel 1 berikut.

Tabel 1.
Skala Interval Derajat Desentralisasi Fiskal

Persentase	Kemampuan Keuangan Daerah
0,00 – 10,00	Sangat Kurang
10,01 – 20,00	Kurang
20,01 – 30,00	Cukup
30,01 – 40,00	Sedang
40,00 – 50,00	Baik
>50,01	Sangat Baik

Setelah diketahui skala interval derajat desentralisasi fiskal Kota Bengkulu, maka selanjutnya dilakukan pengujian seberapa besar pengaruh masing-masing variabel pendapatan Kota Bengkulu dengan menggunakan alat analisis yaitu regresi berganda (*multiple regression*). Menurut Gujarati (2003) bahwa analisis regresi pada dasarnya adalah studi mengenai ketergantungan variabel dependen dengan satu atau lebih variabel independen dengan tujuan mengestimasi dan atau memprediksi rata-rata populasi atau nilai rata-rata variabel dependen berdasarkan nilai variabel independen yang diketahui. Hasil analisis adalah berupa koefisien untuk masing-masing variabel independen. Koefisien ini diperoleh dengan cara memprediksi nilai variabel dependen dengan suatu persamaan. Untuk mendapatkan model yang valid maka dilakukan uji asumsi klasik terlebih dahulu. Regresi berganda yang dipakai untuk memenuhi tujuan penelitian dijabarkan di bawah ini dalam bentuk persamaan. Adapun persamaan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut:

$$Yt = \alpha + \beta_1 PD + \beta_2 RD + \beta_3 HPKD + \beta_4 PDRBPerkap.+ e \dots\dots\dots (2)$$

Dimana :

Yt adalah kinerja keuangan

α adalah konstanta,

$\beta_1, \beta_2, \beta_3$ dan β_4 adalah koefisien regresi PD, RD dan HPKDP dan PDRB Per Kapita

PD adalah jumlah pajak daerah

RD adalah retribusi daerah

HPKDP adalah hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan

PDRBPerkap adalah PDRB Per Kapita

e adalah error term.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan hasil perhitungan rasio derajat desentralisasi fiskal diketahui bahwa kemampuan keuangan daerah Kota Bengkulu masih masuk kategori sangat kurang karena sebagian besar masih berada pada interval 00,00% - 10,00%. Hal ini disebabkan karena masih kurangnya pendapatan asli daerah apabila dibandingkan dengan total pendapatan daerah. Pada tahun 2000-2014, kemampuan keuangan berdasarkan rasio derajat desentralisasi fiskal Kota Bengkulu masih sangat kurang, sedangkan pada tahun 2015 dan 2017 mengalami sedikit peningkatan dengan persentase di atas 10 persen yaitu dengan masing-masing derajat desentralisasi fiskal pada tahun 2015 yaitu sebesar 10,22 persen dan pada Tahun 2017 sebesar 14,87 persen.

Rendahnya derajat desentralisasi fiskal yang dimiliki oleh Kota Bengkulu menunjukkan bahwa pemerintah kota belum cukup mampu membiayai semua kebutuhannya. Dengan demikian, selama ini sebagian besar pengeluaran pemerintah Kota Bengkulu masih sangat tergantung pada pemerintah pusat dan juga menunjukkan bahwa kemampuan pemerintah Kota Bengkulu dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) seperti pajak daerah, retribusi dan lain-lain masih relatif rendah sehingga kinerja keuangan daerah dinilai masih sangat rendah. Adapun hasil perhitungan rasio derajat disentralisasi fiskal dapat dilihat pada Tabel 2 berikut.

$$\text{Kinerja_Keuangan} = 5.448472 + 2.6 \text{ PD}^{***} - 1.38 \text{ RD}^{**} - 3.08 \text{ HPKD} - 1.49 \text{ PDRBPerKap.}^{***}$$

Tabel 2
Perhitungan Perhitungan Rasio Derajat Desentralisasi Fiskal Kota Bengkulu

Tahun	DDF (%)	Kemampuan Keuangan
2000	5,67	Sangat kurang
2001	5,21	Sangat kurang
2002	4,29	Sangat kurang
2003	4,40	Sangat kurang
2004	7,08	Sangat kurang
2005	6,50	Sangat kurang
2006	4,83	Sangat kurang
2007	4,42	Sangat kurang
2008	5,42	Sangat kurang
2009	5,66	Sangat kurang
2010	4,98	Sangat kurang
2011	6,43	Sangat kurang
2012	6,15	Sangat kurang
2013	7,05	Sangat kurang
2014	8,72	Sangat kurang
2015	10,22	Kurang
2016	9,78	Sangat kurang
2017	14,87	Kurang

Sumber: Data sekunder (diolah)

Hasil Uji Statistik

Dengan menggunakan regresi linear berganda diperoleh hasil regresi sebagai berikut. Berdasarkan hasil regresi pada Tabel 3, dapat diketahui bahwa model $R^2_{adjusted}$ sebesar 0.9568. Adapun dari hasil regresi tersebut diperoleh persamaan sebagai berikut.

Tabel 3
Hasil Estimasi Model

Variabel	Koefisien	Std. Error	t-Statistik	Probabilitas
Konstanta	5.448472	0.431923	12.61446	0.0000
PD	2.60E-10	3.15E-11	8.239781	0.0000
RD	-1.38E-10	5.62E-11	-2.457718	0.0276
HPKD	-3.08E-10	4.32E-10	-0.712096	0.4881
PDRBPerkap.	-1.49E-07	4.92E-08	-3.029423	0.0090
$R^2 = 0.956891$			$F = 77.68968$	
Adjusted $R^2 = 0.944574$			$\alpha = 0,05$	
			$N = 19$	

Sumber : Hasil penelitian, data diolah

Hasil ini menunjukkan bahwa besarnya pengaruh pajak daerah, retribusi daerah, hasil hasil peneglolaan kekayaan daerah dan PDRB Per Kapita berpengaruh terhadap kinerja

keuangan Kota Bengkulu sebesar 95.68 persen, sedangkan 4,32 persen dipengaruhi oleh variabel di luar model.

Model ini telah lulus semua uji asumsi klasik, sehingga model tersebut layak untuk dianalisis. Berikut penjelasan variabel-variabel tersebut:

Pengaruh Pajak Daerah terhadap Kinerja Keuangan Kota Bengkulu

Berdasarkan uji t, diperoleh nilai t-Statistik sebesar 8.239781 (bernilai positif) dengan probabilitas sebesar 0.0000 dengan koefisien sebesar 2.6. Hal ini menunjukkan bahwa secara parsial pajak daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja keuangan Kota Bengkulu. Ketika pajak daerah mengalami peningkatan sebesar 1 juta, maka kinerja keuangan akan mengalami peningkatan sebesar 0.26 persen.

Hasil ini sesuai dengan hipotesis bahwa terdapat pengaruh secara signifikan pajak daerah terhadap kinerja keuangan Kota Bengkulu. Hal ini menunjukkan bahwa besarnya pajak daerah sangat berpengaruh terhadap kinerja keuangan daerah. Hal ini tentunya menjadi bahan evaluasi dan sekaligus tantangan tersendiri bagi pemerintah Kota Bengkulu supaya terus meningkatkan pajak daerah sehingga kinerja keuangan atau kemandirian Kota Bengkulu juga semakin meningkat. Apalagi jika kita melihat hasil analisis kinerja keuangan Kota Bengkulu dengan menggunakan pendekatan derajat desentralisasi fiskal yang hasilnya cenderung kurang memuaskan. Jika ingin meningkatkan kinerja keuangan daerah, Pemerintah Kota Bengkulu harus mampu mengoptimalkan pungutan pajak daerah yang tentunya disesuaikan dengan permasalahan pajak di Kota Bengkulu.

Meskipun pajak daerah Kota Bengkulu sudah mengalami peningkatan yang cukup besar yaitu mencapai pertumbuhan rata-rata sebesar 28,6 persen per tahun, tetapi tetap perlu dioptimalkan guna meningkatkan kinerja keuangan pemerintah Kota Bengkulu sehingga tidak terlalu mengandalkan pemerintah pusat. Adapun pajak daerah Kota Bengkulu yang harus dioptimalkann antara lain; pajak parkir, pajak reklame, pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, pajak reklame, pajak pengambilan dan pengolahan bahan galian Golongan C, pajak air bawah tanah dan pajak lainnya.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Alfarisi H (2015), Nggilu, dkk. (2016), dan Mukarramah (2017) yang menemukan hasil bahwa secara

parsial variabel Pajak Daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kemandirian Keuangan Daerah. Selain itu, Saputra dan Fachruzzaman (2016) melakukan penelitian dengan sampel yang lebih luas lagi yaitu Indonesia. Pada penelitian ini, pajak daerah dan retribusi daerah berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan pemerintah yang baik. Selain itu, hasil penelitian ini juga sejalan dengan Tumangger (2014) dan Juwita (2016) yang juga menemukan bahwa secara parsial, pajak daerah berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah.

Pengaruh Retribusi Daerah terhadap Kinerja Keuangan Kota Bengkulu

Berdasarkan uji t, diperoleh nilai t-Statistik sebesar -2.45 (bernilai negatif) dengan probabilitas sebesar 0.0276 dan dengan koefisien sebesar -1.38. Hal ini menunjukkan bahwa secara parsial retribusi daerah berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah Kota Bengkulu pada $\alpha = 0,05$. Ketika retribusi daerah mengalami peningkatan sebesar 1 juta, maka kinerja keuangan akan mengalami penurunan sebesar 0.138 persen. Hasil ini sesuai dengan hipotesis bahwa terdapat pengaruh secara signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah Kota Bengkulu.

Penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Juwita (2016), Mukarramah (2017), Alfarisi H (2015), Saputra dan Fachruzzaman (2016), dan Nggilu dkk (2016) yang juga menemukan bahwa secara parsial retribusi daerah berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan daerah. Hal ini menunjukkan bahwa besar kecilnya retribusi daerah yang mampu diperoleh oleh suatu daerah akan berpengaruh terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah tersebut.

Hasil penelitian ini sedikit berbeda dengan penelitian-penelitian terdahulu. Pada penelitian ini, retribusi daerah justru berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kinerja keuangan Kota Bengkulu. Hal ini menunjukkan bahwa semakin tinggi penerimaan retribusi daerah maka akan menurunkan kinerja keuangan Kota Bengkulu. Hal ini disebabkan oleh retribusi yang diterima tidak sebanding dengan nilai potensi yang ada di Kota Bengkulu, sehingga ketika retribusi itu naik, justru menurunkan kinerja keuangan. Kemudian pada saat yang bersamaan, peningkatan retribusi daerah tidak diikuti oleh peningkatan Pendapatan Asli Daerah secara proporsional terhadap penerimaan daerah. Artinya, terdapat variabel lain seperti pajak daerah, lain-lain PAD yang sah dan hasil

kekayaan daerah yang dipisahkan tidak meningkat secara proporsional terhadap Pendapatan daerah. Dengan kata lain, ketika retribusi daerah mengalami penurunan, akan tetapi disisi lain PAD di Kota Bengkulu tetap mengalami peningkatan. Selain itu, hal ini juga disebabkan karena besarnya kontribusi PAD terhadap pendapatan daerah tidak sebanding dengan besarnya persentase dana bantuan dari pusat.

Pengaruh Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan terhadap Kinerja Keuangan Kota Bengkulu

Berdasarkan uji t, diperoleh nilai t-Statistik sebesar -0.7120 (bernilai negatif) dengan probabilitas sebesar 0.4881 dan dengan koefisien sebesar -3.08 Hal ini menunjukkan bahwa secara parsial retribusi daerah berpengaruh negative namun tidak signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah Kota Bengkulu pada $\alpha = 0,05$, sehingga dapat disimpulkan bahwa hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan.

Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan adalah pendapatan yang berupa hasil perusahaan milik daerah dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, yang terdiri dari bagian laba Perusahaan Daerah Air Minum, bagian laba lembaga keuangan bank, bagian laba lembaga keuangan non bank, bagian laba perusahaan milik daerah lainnya, dan bagian laba atas penyertaan modal/ investasi kepada pihak ketiga. UU Nomor 5 Tahun 1962 menyatakan bahwa pada dasarnya suatu perusahaan daerah adalah perusahaan yang modalnya untuk seluruhnya terdiri dari kekayaan daerah yang dipisahkan.

Apabila perusahaan daerah telah didirikan berdasarkan undang-undang ini, maka modal perusahaan terdiri untuk seluruhnya atau untuk sebagian atas kekayaan yang dipisahkan dari anggaran belanja daerah tetap masuk neraca kekayaan daerah. Dengan demikian besar kecilnya hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan yang diperoleh tidak berdampak pada peningkatan/penurunan kemampuan kinerja keuangan Pemerintah Kota Bengkulu. Hal ini disebabkan karena hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan senantiasa mengalami fluktuasi dan cenderung mengalami peningkatan dengan rata-rata pertumbuhan per tahun mencapai 68,6 persen. Hasil pengelolaan kekayaan daerah tertinggi terdapat pada tahun 2017 yaitu sebesar Rp 3.900.000.000, sementara

pendapatan terendah terdapat pada tahun 2000 yaitu sebesar Rp 115.685.000. Perbedaan besaran pendapatan yang diterima setiap tahunnya disebabkan karena laba setiap perusahaan setiap tahunnya senantiasa mengalami perubahan.

Selain itu, jika dibandingkan dengan sumber-sumber PAD yang lain, maka hasil kekayaan daerah yang dipisahkan memiliki kontribusi yang relatif lebih kecil jika dibandingkan dengan sumber PAD lainnya. Hal ini disebabkan karena perusahaan milik daerah Kota Bengkulu jumlahnya masih relatif sedikit. Ketidakpastian, ketidakstabilan, dan rendahnya hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan setiap tahunnya tidak terlalu memberikan kontribusi yang cukup besar terhadap PAD. Hal ini berdampak juga terhadap rendahnya pengaruh hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan terhadap kinerja keuangan.

Pengaruh PDRB Per Kapita terhadap Kinerja Keuangan Kota Bengkulu

Berdasarkan uji t, diperoleh nilai t-Statistik sebesar -3.0294 (bernilai negatif) dengan probabilitas sebesar 0.0090 dan dengan koefisien sebesar -1.49. Secara parsial PDRB Per Kapita berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah Kota Bengkulu pada $\alpha = 0,05$. Hal ini menunjukkan bahwa ketika PDRB Perkapita meningkat sebesar 1 juta, maka kinerja keuangan akan mengalami penurunan sebesar 0.149 persen. Semakin tinggi PDRB Per Kapita maka akan semakin rendah tingkat kemandirian atau Keuangan Kota Bengkulu. Hal ini kemungkinan disebabkan oleh kurang produktivitas sumber daya manusia, sehingga meningkatkan beban pada keuangan pemerintah dalam penyediaan anggaran peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Syauqi, Siregar dan Syaukat (2017), yang juga menemukan hasil bahwa PDRB Per kapita berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kinerja keuangan Kota Bogor. Dalam penelitian ini disebutkan bahwa faktor yang menyebabkan penurunan kinerja keuangan adalah sektor andalan di Kota Bogor yang masih didominasi oleh sektor perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan motor, industri pengolahan, transportasi dan pergudangan. Padahal, sektor-sektor tersebut tidak termasuk ke dalam jenis pajak daerah yang berhak dipungut berdasarkan perundang-undangan.

5. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa berdasarkan hasil perhitungan rasio derajat desentralisasi fiskal, kemampuan keuangan Kota Bengkulu masih berada pada tingkat kemampuan yang lemah. Secara simultan pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan PDRB Per Kapita berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Kota Bengkulu. Sementara secara parsial, pajak daerah berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap kinerja keuangan Kota Bengkulu, sedangkan retribusi daerah dan PDRB Per Kapita berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kinerja keuangan Kota Bengkulu, sedangkan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan Kota Bengkulu.

6. KETERBATASAN DAN SARAN

Adapun keterbatasan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Penelitian ini hanya terbatas pada kinerja keuangan Pemerintah Kota Bengkulu dengan jangka waktu relatif pendek. Harapannya peneliti selanjutnya bisa mengkaji seluruh kinerja keuangan pemerintah daerah dengan cakupan yang lebih luar dan menambah jangka waktu analisis.
2. Penelitian ini juga hanya memasukkan variabel pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan PDRB Per Kapita. Pada penelitian berikutnya, peneliti bisa memasukkan variabel pendapatan lain di luar Pendapatan Asli Daerah (PAD), seperti Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK) ataupun belanja modal jika ingin mendapatkan gambaran lebih lengkap mengenai pengaruh pendapatan terhadap kinerja keuangan.

Berdasarkan penelitian tersebut, ada beberapa saran yang ingin peneliti sampaikan, antara lain:

1. Dalam upaya meningkatkan kinerja keuangan Pemerintah Kota Bengkulu, sebaiknya Pemerintah Kota Bengkulu melakukan upaya optimalisasi Pendapatan Asli Daerah dan tidak terlalu mengandalkan bantuan dari pusat.

2. Guna meminimalisir hasil penelitian yang tidak signifikan, hendaknya dalam memasukkan variabel sebaiknya pilih variabel yang memang secara teori dan berdasarkan riset memang berpengaruh.

DAFTAR PUSTAKA

- Adi, P. H. (2012). Kemampuan Keuangan Daerah Dalam Era Otonomi dan Relevansinya Dengan Pertumbuhan Ekonomi (Studi Pada Kabupaten dan Kota Se Jawa –Bali). *KRITIS, Jurnal Studi Pembangunan Interdisiplin*, XXI(1),1-19.
- Alfarisi H, S. (2015). Pengaruh Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Dana Perimbangan Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Empiris pada Kabupaten dan Kota di Provinsi Sumatera Barat. *Jurnal Akuntansi*, 3(1), 1-23.
- BPS. (2016). *Statistik Keuangan Pemerintah Provinsi Bengkulu*. Bengkulu: Badan Pusat Statistik.
- BPS. (2016). *Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Bengkulu*. Bengkulu: Badan Pusat Statistik.
- Gujarati. Damodar. (2003). *Basic Econometric*. New York: The McGrow Hill Companies Inc.
- Halim, A. (2004). *Akuntansi Keuangan Daerah*. Jakarta: Penerbit Salemba Empat.
- Hendaris, R.B. (2014). Pengaruh Penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Terhadap Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Pada Kota/Kabupaten di Wilayah Provinsi Jawa Barat. Jawa Barat: Universitas Jendral Ahmad Yani.
- Holtz, E. D., Harvey, R. & Schuyley, T. (1994). Intemporal Analysis of State A Local Government Spending: Theory and Tests. *Journal of Urban Economics*, 35 (2), 159 – 174.
- Indriani, D., & Sastradipraja, U. (2014). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan dan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Pada Pemerintah Daerah Cirebon Tahun Anggaran 2008-2012). *Portofolio*, 11(1), 55-76.
- Khamdana, A. (2016). Pengaruh Desentralisasi Fiskal Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Daerah di Indonesia, 2008 – 2012. *Indonesian Treasury Review: Jurnal Perbendaharaan, Keuangan Negara Dan Kebijakan Publik*, 1(1), 23-38.
- Mahmudi. (2010). *Manajemen Keuangan Daerah*. Jakarta: Erlangga.
- Muhayanah, F. A. 2016. Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan dan Belanja Modal Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten dan Kota Provinsi Jawa Tengah Tahun 2012-2013. Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Universitas Muhamadiyah Surakarta.

- Mukarramah. (2017). *Pengaruh Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Terhadap Kemandirian Keuangan Daerah di Lima Kabupaten/Kota Orovisi Jawa Barat Tahun 2008-2014*. Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah.
- Nggilu, dkk. (2016). Pengaruh Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Terhadap Kemandirian Keuangan Daerah Pada Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Gorontalo. *Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi*, 16 (04), 623-635.
- Peraturan Pemerintah No.1 Tahun 2010 *Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 71 Tahun 2016 Tentang Perhitungan dan Penetapan Tarif Air Minimum*.
- Permendagri No.21 Tahun 2011 *Tentang Perubahan Kedua Atas Permendagri No.13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah*.
- Pramono, J. (2014). Analisis Rasio Keuangan Untuk Menilai Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Kasus Pada Pemerintah Daerah Kota Surakarta). *Among Mukarti*, 7 (13), 83-112.
- Rukmana, W. V. (2013). *Pengaruh Pajak Daerah, Retribusi Daerah, dan Dana Perimbangan Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau*. Kepulauan Riau: Universitas Maritim Raja Ali Haji Tanjung Pinang.
- Saputra, A., & Fachruzzaman. (2016). *Pengaruh Penerimaan Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Terhadap Kinerja Keuangan Pada Kabupaten/Kota Di Wilayah Indonesia*. Bengkulu: Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Bengkulu.
- Septriani, Armely, Ekaputri, R.A., & Pasaribu, E. (2020). Analisis Fenomena Flypaper Effect pada Kinerja Keuangan Kota Bengkulu. *AKUNTABILITAS*, 14(1), 33-56.
- Sulistiyorini, N.R. (2005). Analisis Penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Untuk Meningkatkan Kemampuan Daerah Pemerintah Kabupaten Kediri Tahun Anggaran 2000-2003. Jawa Timur: Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Airlangga.
- Syauqi, M., Siregar, H., & Syaikat, Y. (2017). Strategi Meningkatkan Efisiensi dan Efektivitas Kinerja Keuangan Pemerintah Kota Bogor Dalam Pengelolaan APBD. *Jurnal Manajemen Pembangunan Daerah*, 9(1), 1-16.
- Siddik, M.N. (2002). Optimalisasi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dalam Rangka Meningkatkan Kemampuan Keuangan Daerah. *Orasi Ilmiah*, Yogyakarta.
- Tumangger, H. R. (2014). Pengaruh Pajak Daerah, Retribusi Daerah, dan Dana Perimbangan Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah. UNIMED.
- Wenny, C. D. (2012). Analisis Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) Terhadap Kinerja Keuangan Pada Pemerintah Kabupaten dan Kota di Provinsi Sumatera Selatan. Forum Bisnis dan Kewirausahaan. *Jurnal Ilmiah STIE MDP*, 2 (1), 39-51.
- Whittaker, J. (1995). *The Government Performance and Results Act of 1993: A Mandate for strategic planning and performance measurement*. Arlington, Virginia: Educational Services Institute.

UU No. 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.